

### **BAB III**

## **POTENSI DAN PERKEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI PROVINSI RIAU**

Dalam meneliti perkembangan Halal di provinsi Riau, informasi mengenai geografis, sisi historis, kultur dan kebudayaan, serta strategi pariwisata terdahulu dibutuhkan untuk dapat menemukan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan faktor-faktor yang menjadi penghalang bagi pertumbuhan pariwisata Halal. Penulis memanfaatkan data yang tersedia dari buku-buku di perpustakaan wilayah, artikel-artikel surat kabar, dan arsip digital yang dapat diakses.

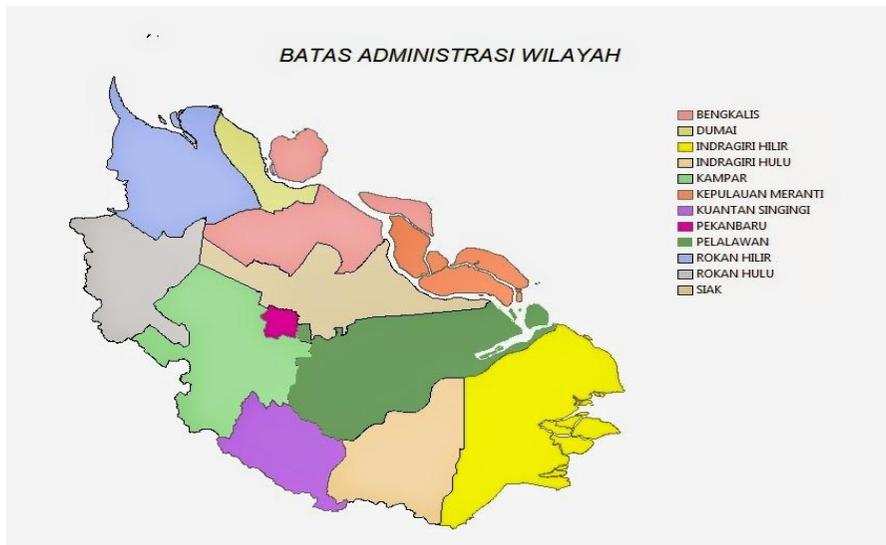
#### **A. Peta Demografis dan Geografis Provinsi Riau**

Riau merupakan penggabungan dari kerajaan Melayu yang pernah berjaya sebelumnya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis. Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha yang keras dalam kurun waktu 6 tahun dari 17 November 1952 s / d 5 Maret 1958.

Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 No.258 / M / 1958, Mr.SM Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau pertama kali pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Desember / I / 44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru menjadi ibukota Provinsi Riau menggantikan Tanjung Pinang. (Riau.go.id, 2019)

### **1. Kondisi Geografis**

Provinsi Riau terletak di Pulau Sumatera, berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara di sebelah Utara, provinsi Sumatera Barat di sebelah Barat, dan provinsi Jambi di sebelah Selatan, berada di sebelah pesisir Timur tepat di tengah-tengah Pulau Sumatera. Provinsi Riau melingkupi wilayah dengan total luas 87.023,66 km<sup>2</sup>. Sebelum tahun 2004, luas wilayah provinsi Riau melingkupi pulau-pulau di pesisir Timur Pulau Sumatera yang sekarang telah dimekarkan menjadi provinsi baru yang bernama provinsi Kepulauan Riau.



**Gambar 3. 1 Kota dan Kabupaten di Provinsi Riau**

Provinsi Riau memiliki 12 Kabupaten dan Kota Madya, yaitu:

- a. Kota Pekanbaru
- b. Kota Dumai
- c. Kabupaten Bengkalis
- d. Kabupaten Indragiri Hilir
- e. Kabupaten Indragiri Hulu
- f. Kabupaten Kampar
- g. Kabupaten Kepulauan Meranti
- h. Kabupaten Kuantan Singingi
- i. Kabupaten Pelalawan
- j. Kabupaten Rokan Hilir
- k. Kabupaten Rokan Hulu
- l. Kabupaten Siak

Riau didominasi oleh dataran rendah dan agak bergelombang dengan ketinggian pada beberapa kota yang terdapat di Wilayah Provinsi Riau antara 2 – 91 m diatas permukaan laut. Kabupaten Bengkalis kota terendah, dengan ketinggian 2 meter di atas permukaan laut, sedangkan Kota Pasir Pengaraian menjadi kota tertinggi dengan ketinggian 91 m dari permukaan laut. Kebanyakan kota di Provinsi Riau berada dibawah 10 meter di atas permukaan laut, seperti Rengat, Tembilahan, Siak, Bengkalis, Bagan Siapi-api dan Dumai dengan kemiringan lahan 0 – 2 %. (BPS Riau, Luas dan Jenis Satuan Tanah, 2015)

Provinsi Riau memiliki lahan gambut terluas di Pulau Sumatera, yaitu 5,09 juta hektar atau 56,42 persen dari luas total lahan gambut di Sumatera. Selain itu, Riau juga mempunyai lapisan gambut terdalam di dunia, yaitu mencapai 16 meter, terutama di wilayah Kuala Kampar. Provinsi Riau juga memiliki kawasan hutan yang saat ini seluas 5,43 juta hektar yang pada usulan rencana program tahun 2017 ini Pemerintah Provinsi Riau menganggarkan sebesar Rp8,3 miliar dalam program pelestarian hutan. (Antara News, 2017)

Riau saat ini mengalami pengawahutan dalam skala besar. Menurut data yang diperoleh WWF, penebangan hutan yang telah mengurangi luas hutan provinsi Riau secara signifikan, dari 78% pada

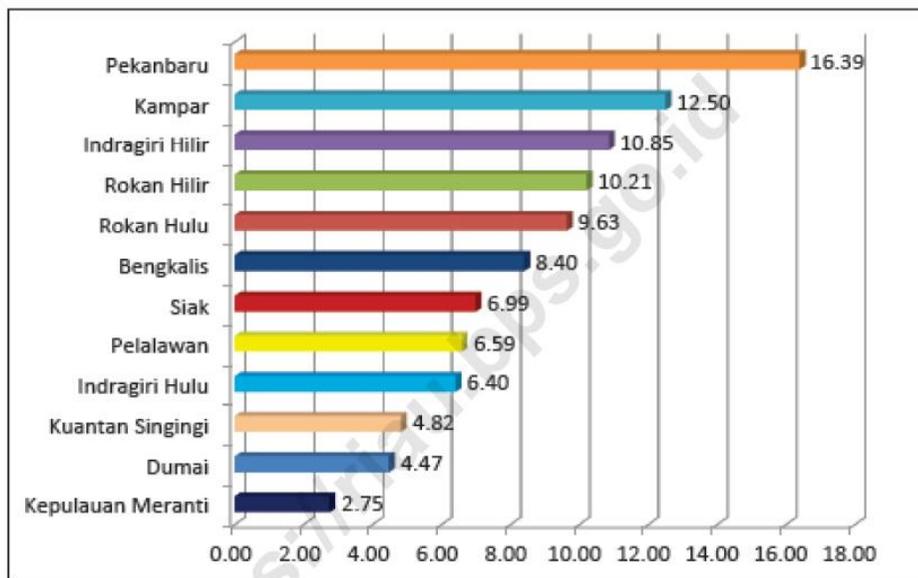
1982 menjadi hanya 33% pada 2005. Rata-rata 160,000 hektare hutan habis ditebang setiap tahun, meninggalkan 22%, atau 2,45 juta hektare pada tahun 2009 (WWF Indonesia & Eyes on The Forest, 2006). Pengawahutan dengan tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan produksi kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di provinsi ini selama bertahun-tahun, dan menjalar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Wilayah perairan provinsi Riau meliputi 19,08% dari keseluruhan wilayahnya, dengan luas mencapai 2.954,97 km<sup>2</sup> dan garis pantai sepanjang 3.201,95 km. Terdapat tujuh kabupaten/kota yang berada di daerah pesisir provinsi Riau, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Siak.

## **2. Peta Demografis**

Jumlah penduduk yang mendiami provinsi Riau saat ini berjumlah 6.717.612 jiwa. Jumlah tersebut paling banyak tersebar di kota Pekanbaru, dengan total penduduk sebanyak 1.081.518 jiwa, dan paling sedikit berada di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan total penduduk sebanyak 185.750 jiwa (BPS Riau, 2018). Jumlah penduduk di provinsi Riau mengalami pertumbuhan sebesar 1,8% setiap tahunnya. Jumlah tersebut kebanyakan berasal dari migrasi

penduduk ke provinsi Riau, karena provinsi Riau dilihat sebagai daerah yang paling menjanjikan bagi para pendatang untuk dapat mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang lebih layak di sekitar Pulau Sumatera.



**Gambar 3. 2 Peta Sebaran Penduduk di Provinsi Riau**

Komposisi etnis di provinsi Riau terbentuk dari beragam suku bangsa. Suku dominannya berasal dari suku Melayu, Jawa, Batak, dan Minang, sementara beberapa suku lain seperti suku Banjar, Bugis, Tionghoa, Nias, Sunda, dan beberapa suku lainnya juga mendiami provinsi Riau dalam jumlah yang tidak begitu besar.

Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di provinsi Riau adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu. Bahasa Minang juga menjadi salah satu bahasa yang banyak digunakan oleh

masyarakat suku Minang yang bermigrasi ke Pekanbaru. Pemerintah provinsi Riau mendorong masyarakatnya, baik penduduk asli Melayu maupun suku pendatang untuk melestarikan kebudayaan Melayu melalui penggunaan kain songket di hari-hari tertentu dan menggunakan Bahasa Melayu dan tulisan Arab Melayu pada papan-papan informasi umum (kantor pemerintahan, penunjuk jalan).

Bahasa Melayu Riau mempunyai sejarah yang cukup panjang karena pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa internasional di kepulauan Nusantara, atau sekurang-kurangnya sebagai bahasa perdagangan di Nusantara. Bahasa Melayu, semenjak pusat kerajaan berada di Melaka kemudian pindah ke Johor dan akhirnya pindah ke Riau mendapat prediket pula sesuai dengan nama pusat kerajaan Melayu karena itu, bahasa Melayu zaman Melaka terkenal dengan Melayu Melaka, bahasa Melayu Johor terkenal dengan Melayu Johor dan bahasa Melayu zaman Riau terkenal dengan bahasa Melayu Riau.

Wijk mengatakan bahwa bahasa Melayu dipergunakan sebagai bahasa perdagangan antar pulau dan akhirnya menjadi bahasa perantara antar kepulauan Nusantara (D. Gerth Van Wijk, 1985, h.7). Bahasa Melayu adalah bahasa yang mula-mula digunakan di suatu

daerah di Sumatra bagian timur yang kemudian disebar luaskan oleh para imigran ke daerah sekitarnya seperti jazirah Malaka, daerah Riau, Kepulauan Lingga, dan selanjutnya ke daerah pantai pulau-pulau lainnya. Bahasa ini sudah dipakai pada zaman Kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa resmi, tidak terbatas dalam bidang administrasi tetapi juga sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan keagamaan dan filsafat

Pada zaman dahulu ada beberapa alasan yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi digunakan, yaitu: (1) Bahasa Melayu Riau secara historis berasal dari perkembangan bahasa Melayu semenjak berabad-abad yang lalu. Bahasa Melayu sudah tersebar ke seluruh Nusantara sehingga sudah dipahami oleh masyarakat Bahasa ini sudah lama menjadi bahasa antar suku di Nusantara; (2) Bahasa Melayu Riau sudah dibina sedemikian rupa oleh Raja Ali Haji dan kawan-kawannya sehingga bahasa ini sudah menjadi standar : dan (3) Bahasa Melayu Riau sudah banyak dipublikasikan berupa buku-buku sastra, buku-buku sejarah dan buku-buku agama

Menurut persentase penduduk menurut agama masyarakat di provinsi Riau, pemeluk agama Islam mendominasi 88,31%, atau dengan jumlah sebesar 5,086,455 jiwa, pemeluk agama Kristen 6,98% atau 401,810 jiwa, pemeluk agama Katolik 1,84% atau 105,816 jiwa,

agama Hindu 0,30% atau 17,416 jiwa, agama Budha 2,51% atau 144,715 jiwa, dan agama Khonghucu 0,06% atau sebesar 3,354 jiwa. Jumlah pemeluk agama Islam terbanyak berada di Kabupaten Kampar dengan jumlah 665,323 jiwa, atau 90,13% dari jumlah penduduknya. (Kementrian Agama Provinsi Riau, 2012).

## **B. Sejarah Melayu dan Islam di Provinsi Riau**

### **1. Sejarah Melayu di Riau**

Secara etimologis, nama Riau berasal dari bahasa Portugis dari kata *rio*, yang berarti sungai. Pada tahun 1514, Portugis melakukan ekspedisi militer dengan tujuan mencari lokasi sebuah kerajaan yang diyakini mereka ada pada kawasan tersebut, dan sekaligus mengejar pengikut Sultan Mahmud Syah yang melarikan diri setelah kejatuhan Kesultanan Malaka. Ekspedisi tersebut dilakukan sepanjang Sungai Siak sehingga wilayah ekspedisi tersebut dinamakan *rio*, yang kemudian penyebutannya berubah menjadi Riau seiring waktu (Schnitger, Fürer-Haimendorf, & Tichelman, 1939).

Sementara dalam riwayat lain disebutkan bahwa kata Riau berasal dari penuturan masyarakat *setempat*, diangkat dari kata *rioh* atau *riuh*, yang berarti ramai, hiruk pikuk orang bekerja. Nama itu kemungkinan telah mulai terkenal semenjak Raja Kecil memindahkan pusat kerajaan Melayu dari Johor ke Ulu Riau pada

tahun 1719. Selama Belanda menjajah dari tahun 1905-1942, nama Riau di pakai untuk sebuah keresidenan yang daerahnya meliputi kepulauan Riau serta Pesisir timur sumatera bagian tengah. Nama Riau terus dipertahankan pada penjajahan Jepang, hingga disahkan menjadi wilayah administrasi provinsi di Indonesia pada tahun 1958.

Riau memiliki ikatan historis yang kuat dengan Malaysia, khususnya negeri Johor dan Pahang, karena sama-sama merupakan bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Johor yang pernah menguasai wilayah kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Riau merupakan satu negeri dari 4 negeri utama yang membentuk kerajaan Riau, Lingga, Johor dan pahang. Melalui perjanjian London yang ditandatangani pada tahun 1824 antara Belanda dengan Inggris (*Anglo-Dutch Treaty*), kerajaan ini terbelah dua. Wilayah Johor dan Pahang dikuasai oleh Inggris, sementara wilayah Riau dan Lingga berada dibawah pengaruh Belanda (Leyden, 1821).

Kesultanan Johor didirikan diatas wilayah administrasi Kesultanan yang sebelumnya berdiri di Malaka. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Yang di-Pertuan atau lebih *dikenal* sebagai Sultan. Sultan dibantu oleh Majlis Orang Kaya yang bertindak sebagai penasihat Sultan dalam memerintah. Majlis Orang Kaya terdiri dari

Bendahara, Temenggung, Laksamana, Shahbandar, dan Seri Bija Diraja.

Pada abad ke 18, Datuk Bendahara berkuasa di Pahang, sementara Temenggung berkuasa di Teluk Belanga, Singapura. Masing-masing dari anggota Majlis *memegang* administrasi wilayah kekuasaan masing-masing yang telah diberikan ketangan mereka oleh Sultan Johor.

Kesultanan Johor *merupakan* pemerintahan yang terdesentralisasi. Terdapat empat negeri utama yang masuk kedalam wilayah kekuasaan Sultan dan dipimpin oleh masing-masing utusan:

1. Muar dan sekitarnya dikuasai Raja Temenggung Muar;
2. Pahang dibawah pemerintahan Bendehara;
3. Riau dibawah kekuasaan Yang Dipertuan Muda,
4. Negeri Johor dan Singapura dibawah kekuasaan Temenggung.
5. Seluruh wilayah lainnya di perintah oleh Sultan.

Sultan berdiam dan memerintah di Lingga (maka diberi sebutan Sultan Lingga). Semua anggota Majlis Orang Kaya kecuali Raja Temenggung Muar *diwajibkan* memberi laporan langsung kepada Sultan; Muar dianggap sebagai wilayah asing namun mengakui kekuatan dan kekuasaan Sultan.

Abdul Rahman Muazzam Shah ditunjuk sebagai Sultan Lingga, untuk memerintah Kesultanan Johor pada tahun 1812 selepas kematian ayahnya. Pengangkatan itu ditolak oleh beberapa anggota kerajaan, karena yang semestinya diangkat menjadi Sultan berikutnya adalah anak tertua, Tengku Hussein yang dikenal dengan sebutan Tengku Long. Pengangkatan Tengku Abdul Rahman saat itu lewat pertimbangan bahwa pada saat kematian ayah mereka, Tengku Hussein sedang berada di Pahang untuk menikah, dan tidak berada di sisi ayahnya di saat-saat *terakhirnya*.

Tengku Abdul Rahman mendapatkan dukungan dari Yang Dipertuan Muda penguasa Riau, Raja Jaafar. Raja Jaafar beranggapan bahwa dalam tradisi Melayu, seorang anak haruslah berada di sisi Sultan pada saat kematiannya untuk dapat dianggap sebagai pengganti sang Sultan. Namun pengangkatan Tengku Abdul Rahman belum mendapatkan restu dari Datuk Bendahara sebagai pemangku adat dan restu dari ibunya sendiri.

Perebutan tentang siapa yang lebih berhak untuk meneruskan kekuasaan antara dua adik-beradik ini menjadi awal mula perpecahan Kesultanan Johor. Tengku Abdul Rahman *mendapat* dukungan dari Yang Dipertuan Muda Raja Jaafar dari Riau, yang juga merupakan keturunan dari kaum Bugis. Tengku Abdul Rahman menjadi Sultan

Johor pada tahun 1812-1824, namun pemerintahannya baru diakui oleh pembesar Kesultanan pada tahun 1822.

Selama Tengku Abdul Rahman memerintah, kakaknya, Tengku Hussein mengasingkan diri di Kepulauan Riau. Bendahara Ali kemudian melakukan perjalanan menuju Riau untuk menaklukkan Raja Jaafar dan kaum Bugis yang bertindak diluar persetujuannya sebagai pemangku adat. Namun ditengah perjalanannya, rombongan *armada* Bendahara Ali dicegat oleh armada Inggris. Dengan bantuan dari Temanggung, pasukan Inggris dibawah pemerintahan Raffles yang juga tidak menghendaki Tengku Abdul Rahman menjadi Sultan, hendak membawa kembali Tengku Hussein dari pengasingannya dan dijadikan Sultan di *Johor*.

Inggris membuat perjanjian yang menyatakan bahwa Inggris akan mengakui Tengku Hussein sebagai penguasa yang sah dari Johor dan Temanggung sebagai *penguasa* di Singapura dengan syarat Inggris mendapat izin membangun pos dagang di Singapura. Bendahara Ali dipaksa untuk menyetujui penunjukan kedua raja tersebut sebagai pemangku adat.

Langkah yang diambil oleh Raffles membuat Belanda geram, sehingga menimbulkan situasi yang panas antara Inggris dan Belanda di Singapura. Untuk meredam tensi yang terus meninggi, Inggris dan

Belanda sepakat untuk membagi wilayah kerajaan tersebut menjadi dua bagian. Kesepakatan tersebut disahkan melalui perjanjian *Anglo-Dutch Treaty*, yang menandai kepergian Belanda dari Singapura. Perjanjian tersebut juga menandai berpisahnya wilayah Riau-Lingga dari kekuasaan Kesultanan Johor.

Menurut para ahli sejarah, perjanjian tersebut tidak sepenuhnya memecah Kesultanan Johor karena perjanjian tersebut tidak diakui oleh para petinggi dan para anggota Kesultanan. Perjanjian itu sendiri hanya membelah lingkup pengaruh antara *Inggris* yang menguasai wilayah Johor-Pahang-Singapura dan Belanda yang menguasai wilayah Riau-Lingga.

Meskipun demikian, Inggris tetap bersikeras untuk mengangkat Tengku Hussein menjadi Sultan yang memerintah di wilayah Johor-Pahang-Singapura. Tengku Abdul Rahman yang saat itu terusir dari tahtanya pergi menuju Lingga dengan status *tetap* sebagai Sultan, namun kekuasaannya hanya melingkupi wilayah Riau dan Lingga saja. Dibawah bimbingan Raja Ja'far yang memiliki wilayah di Riau, *Sultan* Abdul Rahman memerintah dari tahun 1822 sampai tahun 1824, sebelum akhirnya wilayah Riau diakuisisi oleh Belanda. Beberapa Sultan silih berganti memerintah Kesultanan Riau-Lingga:

- a. Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah (1812–1832)
- b. Sultan Muhammad II Muazzam Shah (1832–1835)
- c. Sultan Mahmud IV Muzaffar Shah (1835–1857)
- d. Sultan Sulaiman II Badrul Alam Shah (1857–1883)
- e. Sultan Abdul Rahman II Muazzam Shah (1885–1911)

Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman II Badrul Alam Shah yang berasal suku Bugis menjadi akhir bagi sejarah panjang Kesultanan Malaka dan Johor. Sultan Sulaiman yang mendirikan Kesultanan Riau-Lingga di Johor yang berhasil direbut oleh keluarga Kesultanan Riau-Lingga dengan bantuan klan Bugis pada tahun 1857. Pada tahun yang sama pula Sultan Sulaiman menandatangani perjanjian dengan Belanda. Melalui tanda tangan yang ia gariskan di atas kertas perjanjian, Sultan Sulaiman menyerahkan seluruh wilayah kekuasaannya di Riau dan Lingga kepada Belanda, serta memberikan hak penuh atas administrasi pemerintahan di wilayah tersebut. Isi perjanjian ini bertahan hingga negara Indonesia dan Malaysia terbentuk. Wilayah Johor yang diserahkan kepada Sultan saat itu menjadi salah satu negeri bagian Diraja Malaysia, sementara wilayah Riau dan Lingga yang diserahkan kepada Belanda sekarang masuk ke dalam wilayah pemerintahan Republik Indonesia. (Raja Ali Haji & Translated by Virginia Matheson, 1971)

## 2. Sejarah Islam Di Riau

Menurut beberapa ahli sejarah, Islam datang pertama kali ke Riau daratan melalui jalur sebelah Barat, di sebuah desa bernama Kuntu di wilayah Kampar Kiri. Terletak 85 Km dari ibukota Pekanbaru, Desa Kuntu merupakan salah satu desa tertua yang ada di provinsi Riau. Berdirinya Desa Kuntu dapat dilacak hingga pada abad 6 Masehi.

Dulunya di desa ini terdapat Kesultanan yang dirintis dan dibina oleh Kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Kesultanan ini diberi nama Kuntu Dar-Assalam, sejajar dengan nama kota *Aceh* Dar-Assalam yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Pasai. Namun di kemudian hari, wilayah ini dikuasai oleh Sriwijaya dan kemudian direbut oleh Majapahit karena dilihat sebagai wilayah perkebunan yang strategis.

Dalam sumber lain, diketahui *bahwa* Islam telah masuk ke Kuntu bahkan sebelum dikuasai oleh Kerajaan Pasai. Desa Kuntu sempat menjadi pusat peradaban karena merupakan daerah penghasil Lada terbesar di dunia. Pada masa itu, banyak pedagang dari India, Persia, Arab dan Cina yang datang untuk berdagang di desa Kuntu. Para pedagang dari Gujarat dan Cina berperan dalam menyebarkan agama Buddha, sementara para pedagang dari Persia dan Arab berperan dalam menyebarkan agama Islam disana.

Pada tahun 670-730 Masehi, berdirinya kerajaan Cina beragama Buddha Mahayana di Timur, dan Kekhalifahan Muawiyah beragama Islam Syiah di Barat, berpengaruh besar pada kondisi dunia saat itu, khususnya kerajaan-kerajaan yang terletak di wilayah semenanjung Asia dan Nusantara. Persaingan pengaruh antara kedua kerajaan besar tersebut juga melibatkan tarik-menarik agama *Islam* dan Buddha di wilayah yang menjadi jalur perdagangan keduanya. (Mughtar Lutfi & Suwardi MS, 1977)

Kuntu Kampar juga tidak terlepas dari dampak persaingan tersebut. Dakwah pengembangan islam terhenti selama 4 abad disebabkan Cina merasa terganggu kepentingan ekonomi dan pengembangan agamanya, maka Cina mengutus dua orang sarjana agama Budha yaitu: Wajaro Bodhi dan Amogha Bajra. Sejak saat itu, pedagang dari Arab dan Persia tidak datang lagi ke Kuntu Timur. Pada masa inilah apa yang diistilahkan “Apik Tupai, Panggang Kaluang” dimana pada saat itu penduduk kehilangan pedoman/ tuntunan agama.

Pada permulaan abad ke-7 sesudah Rajendra Cola dari India Selatan berhasil melumpuhkan Sriwijaya, raja Palembang bernama Aria Darma mengirim surat ke Muawiyah meminta dikirimkan Ulama/mubaligh. Menindak lanjuti permohonan raja Palembang tersebut, maka Khalifah Muawiyah mengutus Syekh Burhanuddin.

Syekh Burhanuddin merupakan seorang ulama yang berjasa besar atas penyebaran Islam di Riau. Dari Desa Kuntu, Syekh Burhanuddin melanjutkan dakwahnya ke wilayah Kerajaan Rokan yang saat itu telah memiliki peradaban yang beradab serta sistem pemerintahan yang baik. Kerajaan Rokan dipimpin oleh *seorang* raja yang berkedudukan *primus inter pares* bernama Raja Said. Raja Said menerima baik kedatangan dakwah Islam dan menjadi salah satu orang yang pertama kali memeluk agama Islam di Rokan. Atas jasanya, Syekh Burhanuddin dikenang sebagai “Syekh Burhanuddin Waliyullah Qodi Makkatul Mukarramah”. Ia dimakamkan diantara empat makam raja-raja Kuntu di Batang Sebayang, bersama sebilah pedang, tongkat, sebuah buku Fathul Wahab, dan selemba kertas berisi khutbah.

Islam dan Melayu berasimilasi dengan sangat padu antara satu dengan lainnya. Nilai-nilai keislaman telah melebur *dalam* budaya dan keseharian masyarakat Melayu. Salah satu bukti peleburan ini dapat dibuktikan melalui literatur-literatur yang ditulis dalam tulisan Arab-Melayu oleh para budayawan Melayu, salah satunya dapat dijumpai dalam Gurindam Dua Belas dan Tuhfat Al-Nafis yang dikarang oleh Raja Ali Haji.